

HOTAL GK SAJIKAN BUNDABERG

Minuman Impor
Australia, Tanpa Alkohol

SAMARINDA – Ingin nikmati sensasi minuman bar tanpa mengandung alkohol? Jangan khawatir. Di Hotel Grand Kartika punya sajiannya.

Namanya Bundaberg. Minuman impor asal Australia. Kini tersaji di Bar Hotel Grand Kartika. Menariknya lagi, terdapat banyak varian rasa yang unik dan patut sobat GK coba. Di antaranya *ginger beer*. Minuman jahe berkarbonasi. Bundaberg Sarsaparilla yang terbuat dari akar Sarsaparilla terbaik, akar manis, kacang vanilla dan molase. Ada pula *passion fruit* komposisi dari markisa yang dihaluskan. Lalu *creaming soda* dari *red berry*. Serta tradisional *Lemonade* yang dibuat dengan lemon Eureka asli Australia. Hal itu disampaikan langsung oleh Marketing Communication Hotel Grand Kartika, Andi Tri Saputra.

“Semua bisa dinikmati di Sevendays Bar Hotel Grand Kartika Samarinda. Dengan memberikan pelayanan terbaik, tentu saja di saat anda bersantai selepas lelahnya



BUNDABERG, Sari minuman baru di Sevendays bar Hotel Grand Kartika Samarinda.

rutinitas kerja anda,” ucap pria yang akrab disapa Andi ini.

Diketahui, Grand Kartika sendiri merupakan hotel terbaik berbintang tiga di pusat Kota Samarinda. Sehingga, dipastikan tak ada keraguan dalam hal pelayanan. Pelanggan tak perlu merasa risau dengan penyebaran pandemi. Karena Hotel GK ini sudah dilengkapi dengan standar sertifikasi

CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*). Sehingga, terbukti aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan pemerintah.

“Hotel Grand Kartika menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan,” tutur pria dengan keramahannya sembari menunjukkan fasilitas hotel GK.

Jadi, tunggu apalagi? Untuk info dan pemesanan hubungi 0811 5813 669. Atau dapat berkunjung di alamat Jalan Khalid No 35, Samarinda. Info lebih lanjut bisa pula mengunjungi website: www.hotelgrandkartika.com/ ramadhan. Atau dapat mengunjungi akun media sosial Instagram @hotelgrandkartika. **ADV/TOP/BOY**



KOMISI IV DPRD Kaltim menggelar diskusi atau rapat dengan pendapat bersama BEM FEB Unmul bahas persoalan terkait kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi.

Minta Pemerintah Tangani Lonjakan Pandemi

SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin S Sos S Fil mengapresiasi respons cepat pemerintah terkait kondisi peningkatan kasus COVID-19 beberapa hari terakhir.

Diketahui, Pemerintah Daerah telah resmi menerapkan aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ditengah kasus terkonfirmasi COVID-19 yang terus melonjak. Selain itu Samarinda juga menerapkan

Kukar ini, juga berharap agar PPKM kali ini diterapkan pemerintah dengan konsisten, dan mendukung penuh kebijakan PPKM oleh pemerintah untuk menekan tingginya kasus COVID-19 khususnya di Kaltim. “Kami sangat setuju PPKM ini dilakukan, namun perlu dipikirkan pula para buruh harian atau penjual yang ada di pinggir jalan, jangan sampai tidak diperhatikan,” pinta Saleh.



SALEHUDDIN

Sementara itu, para pembatasan kegiatan. Selain memberikan apresiasi, dirinya juga meminta kepada pemerintah tak melupakan kewajibannya selama PPKM diberlakukan. Menurut Politisi dari Partai Golkar ini, selama pembatasan kegiatan berlaku, harus ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang mengarah pada bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. “Kebijakan PPKM yang sudah tepat ini jangan sampai membuat rakyat kecil susah. Oleh karena itu perlu adanya bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat kecil saat PPKM ini diberlakukan, harus juga dipikirkan,” kata pria yang akrab disapa Saleh ini.

Legislator Karang Paci Asal Dapil

gusaha diharapkan ikut membantu dan memperhatikan kesejahteraan karyawannya selain tidak hanya memikirkan keuntungan. “Dalam situasi seperti ini, tak bisa hanya pemerintah yang bergerak sendiri, harus ada campur tangan dari semua pihak, termasuk perusahaan maupun pihak swasta,” beber pria yang dikenal ramah ini.

Selain itu lanjut Saleh, salah satu faktor tingginya kasus COVID-19 saat ini adalah masih sedikit masyarakat yang mengikuti imbauan untuk melakukan vaksin. “Untuk itu pemerintah kembali perlu mengencarkan vaksinasi kepada masyarakat,” pungkasnya. **ADV/TOP/BOY**

Komisi IV RDP Bersama Mahasiswa

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul. Terkait kegiatan visiting oleh BEM FEB Unmul Periode 2021 di gedung E lantai 1, belum lama ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid. Ia mengatakan sebagai senior dan alumni Unmul sangat mengapresiasi kegiatan vis-

iting. Dan keinginan mahasiswa untuk berdiskusi dan berdialog kepada wakil rakyat.

“Esensinya bahwa lembaga DPRD juga termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan, karena disini bisa belajar secara langsung praktik berdemokrasi,” ujar politisi yang juga Ketua Fraksi PPP ini.

Selanjutnya, menanggapi hal tersebut, Rusman Ya'qub mengatakan bahwa saat ini penanganan pandemi adalah dengan realokasi

dan refofusing anggaran. Pada tahun anggaran 2020 khusus untuk Kaltim dalam menangani COVID-19 adalah sebesar 536 miliar.

“Dana tersebut diperuntukkan untuk jaring pengaman sosial, untuk pemulihan ekonomi dan untuk penanganan kesehatan. Yang paling banyak dalam penggunaan alokasi anggaran ini adalah bidang kesehatan,” pungkasnya.

Pimpinan rombongan Andi Indra Kurniawan selaku Gubernur BEM FEB Unmul menyampaikan,

kedatangan mereka ingin bersilaturahmi juga berdiskusi tentang bidang kesejahteraan masyarakat. Ia melanjutkan, diskusi ini terkait permasalahan atau isu-isu di Kaltim tentang kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi COVID-19. “Mengenai hal itu, apa solusi yang bisa ditawarkan Komisi IV yang menaungi bidang tersebut, untuk kemudian bisa memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat Kaltim,” katanya. **ADV/TOP/BOY**

OPINI

Membela Hak dan Kepentingan Publik

OLEH: NASRULLAH

MASIH segar dalam ingatan para sarjana dan penikmat media sebuah satire dari Prof. Yusril Ihza Mahendra beberapa tahun lalu mengenai bagaimana negara seharusnya dikelola. Negara bagi Prof Yusril, sapaan Professor Yusril Ihza Mahendra ini, bukanlah “warung”, apalagi perusahaan keluarga, untuk konteks hari ini. “Mengurus negara jangan seperti mengurus warung”, komentar Prof Yusril kala itu yang lantas ramai dikutip oleh media.

Hari ini, di tengah banyaknya pengusaha yang terjun ke dunia politik hingga ke pemerintahan, maka bukan tak mungkin, sindiran sekaligus peringatan Prof Yusril di atas masih dan makin relevan. Namun, mengurus negara tak lagi bisa dimaknai sebagai “amatiran” semata seperti mengurus warung, tapi bisa dimaknai lebih dari itu.

Mengurus warung dan perusahaan keluarga tentu berbeda dari segi level manajemen. Tapi, keduanya sama tidak cocoknya dengan bagaimana “mengurus negara”. Prof Yusril seperti ingin

menyindir para politisi dan penyelenggara negara—yang bisa jadi adalah penguasa baru— untuk tidak kelihatan “amatiran” dan atau “menyimpang” jauh dalam mengelola negara.

Perlu diketahui bahwa mengurus negara, dengan menjadi pejabat negara, hari ini telah mengalami perubahan paradigma. Urusan negara hari ini adalah urusan publik. Olehnya, pejabat negara berubah menjadi pejabat publik. Urusan publik, oleh pejabat publik adalah urusan mendistribusikan keadilan kepada publik, kepada masyarakat luas.

Mengelola negara, sebagaimana teguran Prof Yusril di atas, sudah berkembang menjadi bagaimana mengelola kepentingan publik. Yakni, kepentingan akan keadilan yang terdistribusi mulai dari akses terhadap fasilitas publik hingga distribusi sumber daya ekonomi yang adil dan merata.

HAK PUBLIK DAN KEPENTINGAN PUBLIK

Hak publik lazim dikenal di negara yang menganut prinsip demokra-

si. Salah satu pemikir utamanya adalah Jurgen Habermas. Habermas dikenal dengan teorinya mengenai *Public Sphere*.

Public sphere (mental publik) dalam artian sebenarnya berbeda dengan *Public space* (ruang publik). Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua lebih bersifat material. Keduanya, meski demikian, membicarakan hal yang sama, yakni hak publik di hadapan penyelenggara negara.

Alwy Rachman, akademisi Ilmu Budaya cum Budayawan, menyebut *public sphere* adalah ruang bagi masyarakat luas (*society*) untuk mendiskusikan kebijakan (*to discuss policy*) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terdapat percakapan dan pikiran kritis di dalamnya. Sementara itu, *public space*, seperti taman kota dan fasilitas umum lainnya adalah ruang yang bisa dinikmati secara fisik dan bersifat material.

Intinya adalah yang publik, baik dalam arti *Space* maupun

Sphere merupakan arena untuk memberikan akses sekaligus mendistribusikan keadilan bagi masyarakat. Olehnya, urusan publik adalah urusan keadilan bagi rakyat banyak.

Keadilan, merupakan hak publik yang menjadi kepentingan publik utama di dalam prinsip-prinsip negara demokrasi. Olehnya itu, kepentingan publik perlu didahulukan. Kepentingan publik ini mesti berada di atas kepentingan pribadi—dalam analogi sebagai pemilik warung—dan di atas kepentingan keluarga dan golongan—bagi pemilik usaha keluarga.

Kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga, mestilah dipisahkan dari kepentingan publik ketika hendak ataupun telah menjadi penyelenggara negara. Pengetahuan dan praktik ini penting pula dipahami secara mendalam oleh para politisi di partai politik yang hari ini sedang banyak diisi oleh kalangan pengusaha, khususnya yang berkiprah di parlemen.



NASRULLAH

ETIKA PUBLIK DAN KEADABAN POLITISI

“Dalam demokrasi luhur adab, hukum berenang di lautan etika. Dalam demokrasi rendah adab, surplus pasal konstitusi dan undang-undang tak membuat kepastian dan tertib hukum, melainkan selalu dicari celahnya demi kepentingan sesaat.”

Kutipan kalimat-kalimat ini adalah milik Yudi Latif, seorang pemikir bangsa terkemuka dewasa ini, di salah satu media nasional. Kutipan ini menegaskan pentingnya etika publik untuk menegakkan apa yang disebutnya sebagai demokrasi luhur adab atau demokrasi yang berkeadaban dalam bahasa lain.

Dalam demokrasi berkeadaban, moral politik dan etika publik adalah “kompas etis” bagi para pelakunya. Lawan dari demokrasi luhur adab, masih menurut Yudi Latif, adalah demokrasi rendah adab. Demokrasi yang tidak berkeadaban, nama lainnya. Demokrasi yang tidak berkeadaban dicirikan oleh perilaku yang suka mencari-cari celah aturan untuk kepentingan sesaat. Dalam model berdemokrasi ini, para politisi tak lain seperti predator yang selalu haus dan lapar akan kepentingan sesaat dan siap memangsa apa saja di depannya, termasuk moralitas sebagai politisi dan etika publik itu sendiri.

Kompas etis, dalam istilah Yudi Latif di atas adalah kunci dalam menjalankan demokrasi berkeadaban. Tanpanya, yang ada adalah pengingkaran terhadap moral. Dengan begitu, pengingkaran terhadap moral berpotensi menghadirkan laku berdemokrasi rendah adab dimana hak dan kepentingan publik bisa diterabas begitu saja. Apatahlagi, jika kepentingan warung sendiri dan usaha keluarga ada di baliknya, terlebih pula jika uang dianggap mampu menyelesaikan segalanya.

Berkaca dari peringatan Prof Yusril dan Yudi Latif di atas, penting kiranya, publik mencermati bagaimana laku pemilik warung dan pemilik usaha keluarga ketika mendapat amanah mengurus urusan publik.

Apakah amanah dalam menjaga hak publik dan menjalankan kepentingan publik untuk mendistribusikan keadilan itu tetap berjalan? Jika tidak, tentu publik berkewajiban membela hak dan kepentingan publik miliknya. Membela hak dan kepentingan publik itu penting, tak lain dan tak bukan demi terwujudnya demokrasi luhur adab dan berkeadaban di negeri ini. Tak terkecuali di Bumi Etam. **ADV/BOY**